

**BANJAR MENUJU KOTA AGROPOLITAN  
(Studi Implementasi Salah Satu Visi Wali Kota Banjar Tahun 2018-2023)**

**Riza Purnama**

*Email: [rizapurnama06@gmail.com](mailto:rizapurnama06@gmail.com)*

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
STISIP Bina Putera Banjar

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil observasi di Kota Banjar ditemukan beberapa permasalahan belum terealisainya Banjar menjadi kota agropolitan, yang mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasis agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018-2023 yaitu menuju Kota agropolitan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis metodenya deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dilakukan terhadap 9 orang yaitu pihak BAPPEDA, DISTAN dan masyarakat Kota Banjar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018-2023 yaitu menuju Kota Agropolitan secara umum belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah cenderung tidak serius dalam mewujudkan Banjar menuju kota agropolitan, sarana prasarana yang tidak memadai, partisipasi masyarakat yang kurang terhadap salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018-2023, dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan keputusan, identifikasi masalah, dan tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Agar tercapainya visi tersebut maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan visi, selain itu sarana prasarana pendukung juga diperlukan guna menunjang kegiatan agrobisnis.

**Kata Kunci:** Implementasi, Agropolitan, Visi Wali Kota

**ABSTRACT**

*Based on the results of observations in the City of Banjar, it was found that there were several problems in the realization of Banjar as an agropolitan city, which means that the condition of Banjar City, which economic activities are based on agrobusiness, agroindustry, agrotourism, distribution centers of agricultural products or services. The purpose of this study is to describe the implementation of one of the vision of the Mayor of Banjar in 2018-2023, which is towards agropolitan city. The research approach used in this study is a qualitative approach with the type of descriptive method. Sampling technique with snowball sampling. Data collection was carried out using participatory observation techniques, in-depth interviews, and documentation, which were conducted on 9 people, namely the BAPPEDA, DISTAN and the people of Banjar City. The results of this study indicate that the implementation of one of the vision of the Mayor of Banjar in 2018-2023 that is towards the Agropolitan City in general has*

*not been fully realized. The government tends not to be serious in realizing Banjar towards an agropolitan city, inadequate infrastructure facilities, lack of community participation in one of the vision of the Banjar Mayor in 2018-2023, and the conversion of agricultural land. This can be seen from the implementation of the decision, problem identification, and goals / objectives to be achieved. In order to achieve this vision, it is necessary to socialize to the public about understandings relating to the vision, besides supporting infrastructure is also needed to support agrobusiness activities.*

**Keywords:** *Implementation, Agropolitan, Mayor's Vision*

## PENDAHULUAN

Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian. Konsep Agropolitan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan hewan, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Di Indonesia terdapat beberapa Kota/Kabupaten yang menerapkan konsep agropolitan seperti Kota Batu, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Donggala, Kabupaten Cianjur dan masih banyak contoh Kota/Kabupaten yang mengembangkan konsep agropolitan.

Berdasarkan salah satu visi Kota Banjar yaitu Banjar menuju kota agropolitan yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian, dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Maka peneliti mencoba mengkaji antara sistem dalam agropolitan dan fakta dilapangan.

Agrobisnis merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan pra-panen, panen, pasca-panen dan pemasaran. Jika melihat pengertian agrobisnis tersebut, di Kota Banjar memiliki komoditas unggulan pertanian yaitu salah satunya adalah perkebunan belimbing madu yang sudah diuji kualitasnya melalui lomba pameran buah tingkat Nasional, namun

dalam sistem agrobisnis, pemasaran belimbing madu masih sangat terbatas mengingat belum adanya pasar agro yang dikembangkan di daerah tersebut, namun pemasaran dilakukan di pasar lokal dan hanya dijual kepada warung-warung dan kios-kios terdekat saja. Lalu contoh lainnya adalah rambutan sibatulawang yang terdapat di Desa Karyamukti, komoditas cabai di Kecamatan Langensari.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan di wilayah Kota Banjar dan mengacu pada visi Kota Banjar menuju kota agropolitan, peneliti menemukan permasalahan :

1. Pemerintah cenderung tidak serius, wilayah yang memiliki potensi dan memiliki komoditas unggulan tidak dikelola dengan sungguh-sungguh seperti Desa Waringinsari yang memiliki desa wisata buah yang belum berjalan secara optimal, wisata Situ Leutik yang sudah lama diperbaiki namun belum bisa berjalan sebagai wisata yang berbasis agro. Di Kota Banjar juga terdapat alih fungsi lahan pertanian yang semulanya lahan pertanian sawah menjadi darat, hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Kota Agropolitan. Selain itu tidak adanya *masterplan* agropolitan, ini menunjukkan bahwa kurang seriusnya pemerintah dalam mewujudkan Banjar menuju Kota Agropolitan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran penanganan hasil produktivitas pertanian, seperti pasar untuk hasil –

hasil pertanian, teknologi penunjang agrobisnis untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok di kawasan agropolitan.

3. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang Banjar menuju agropolitan. Meskipun mayoritas penduduk Kota Banjar adalah petani namun tidak semua masyarakat faham tentang konsep tersebut, hal ini menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan visi menuju Kota Agropolitan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Banjar menuju Kota Agropolitan maka peneliti menggunakan teori implementasi menurut Wahab dalam Tahir

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar yaitu menuju Kota Agropolitan dan untuk mengetahui faktor hambatan dalam implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar menuju Kota Agropolitan.

## LANDASAN TEORI

### Kebijakan

#### 2.1.2.1 Implementasi

Implementasi adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan yang akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang akan dilaksanakan dan merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane (dalam Sabatier, 1982: 21-48) adalah:

Implementasi sebagai konsep dapat dibagi kedalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu.

Sedangkan menurut Ripley dan Frankin (dalam Winarno, 2012: 148) berpendapat bahwa, “implementasi adalah apa yang

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata”.

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

### Kebijakan

Istilah kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan berasal dari kata ‘*wisdom*’. Menurut Syafie (2011: 145) Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena “kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah”.

Menurut Helco (dalam proses dialih bahasakan oleh Santoso, 2011: 140) bahwa kebijakan (*policy*) adalah istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang “lebih besar” ketimbang gerakan sosial. Jadi, kebijakan dari sudut pandang tingkat analisis, adalah sebuah konsep yang kurang lebih berada ditengah – tengah. Elemen kedua esensial yang terkandung dalam penggunaan istilah itu oleh kebanyakan penulis adalah aspek tujuannya.

Pemahaman mengenai kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang lebih besar daripada keputusan yang dibuat, tetapi kebijakan yang dibuat lebih kecil dari pada keputusan yang dibuat, tetapi kebijakan yang dibuat lebih kecil dari pada gerakan sosial. Dengan demikian

kebijakan memiliki dua sudut pandang yang berbeda, dilihat dari tujuannya.

### **Implementai Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan pemerintah, aspek pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting bagi keseluruhan proses kebijakan. Pernyataan tersebut sepaham dengan yang dikemukakan oleh Udoji (dalam Wahab, 2012: 59) sebagai berikut : Implementasi kebijakan adalah suatu yang paling penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi ala arsip kalau tidak diimplementasikan.

Kebijakan yang dibuat pemerintah bersama legislatif dan disetujui oleh legislatif perlu segera dilaksanakan untuk mengatur berbagai kepentingan umum. Namun demikian tahap yang paling sulit dalam suatu proses kebijakan pemerintah adalah tahap pelaksanaan kebijakan pemerintah itu sendiri.

Implementasi merupakan tahap terpenting dalam suatu proses kebijakan. Setelah kebijakan tersebut dibuat, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut, apabila tidak dilaksanakan maka sia-sia kebijakan itu dibuat. Pengertian implementasi kebijakan lebih komprehensif dapat pula kita telusuri dari pendapat Mzanian dan Sabatier yang dikutip Wahab (2012: 68) sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan, kebijakan adalah keputusan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazim keputusan tersebut tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung

setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output*/kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaannya dilaksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok – kelompok sasaran, dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan – badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan bersangkutan.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk memperoleh pemahaman yang sebenarnya mengenai implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018 – 2023 yaitu Banjar menuju Kota Agropolitan serta dengan menggunakan metode ini dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses implementasi tersebut, sehingga peneliti berkeyakinan bahwa metode penelitian kualitatif dianggap relevan.

Pendekatan kualitatif juga dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses kebijakan publik (dari tahap awal hingga tahap akhir) tentang Banjar menuju Kota Agropolitan diimplementasikan. Sehingga tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana

implementasi Banjar menuju Kota Agropolitan

### **Informan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjar. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*, yaitu sesuai dengan kepentingan penelitian dalam rangka menjangkau informasi.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Banjar, Kepala Bidang Insfratuktur Kewilayahan BAPPEDA, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DISTAN) Kota Banjar, Kepala Bidang Pertanian DISTAN dan (empat orang) masyarakat Kota Banjar

### **Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi Banjar menuju Kota Agropolitan, dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, seperti wawancara dengan masyarakat petani yang memiliki usaha dibidang pertanian.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan implementasi Program Banjar Cerdas. Dalam hal ini laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi Banjar menuju Kota Agropolitan.

### **Teknik Analisis Data**

Miles and Huberman, (dalam Sugiyono, 2016: 247): memberikan model analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data);
2. *Data Display* (penyajian data);
3. *Conclusions Drawing/verification*.

Add.1 Reduksi data berarti data harus direduksi karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, semakain lama peneliti ke lapangan, maka akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi, karena dalam penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan temuan dan temuan-temuan di lapangan akan sangat kompleks dan perlu adanya ketelitian dalam mereduksi. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Add.2 *Data Display* dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Add.3 *Conclusions drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang kredibel dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **Implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tentang Banjar Menuju Kota Agropolitan**

Implementasi merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat membuat kemajuan atau kemunduran atau bahkan tidak memiliki dampak sama sekali bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengeahui Implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tentang Banjar menuju Kota Agopolitan, maka peneliti melakukan wawancara terhadap pihak – pihak yang memiliki informasi sehingga penelitian ini mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Implementasi dalam penelitian ini didasarkan pada konsep implementasi dari Wahab dalam Tahir (2014: 55) antara lain pelaksanaan keputusan, mengidentifikasi masalah, dan tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

#### **a) Pelaksanaan Keputusan**

Berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 pada BAB V lembar ke 305 yang di dalamnya dipaparkan salah satu visi Wali Kota Banjar yaitu Banjar menuju Kota Agropolitan, yang bermakna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian. Strategi pemerintah

Kota Banjar dalam rangka mewujudkan Banjar menuju Kota Agropolitan Pemerintah Kota Banjar melakukan pembangunan dengan cara mengembangkan daya tarik dan potensi daerah.

Kawasan yang difokuskan dalam mewujudkan Banjar menuju kota agropolitan berdasarkan komoditas unggulannya adalah Kecamatan Langensari tepatnya Desa Waringinsari dengan komoditas unggulan belimbing madu, Desa Karyamukti dengan komoditas unggulannya rambutan sibatulawang, dan menurut keterangan Bapak Husen Husaeni, S.T selaku Kepala Bidang Insfratuktur dan Kewilayahan, Situ leutik juga dalam tahap pembangunan guna mewujudkan wisata yang berbasis agro ( agrowisata)

Pelaksanaan keputusan salah satu visi Wali Kota Dalam implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar yaitu Banjar menuju agropolitan masih dalam tahap pengembangan dan pembangunan menuju kota agropolitan, pemerintah tidak serius dalam pelaksanaan visi tersebut, hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah dalam penjabaran visi Kota Banjar yang cenderung tidak jelas dan tidak memiliki target menuju Kota Agropolitan yaitu aktivitas ekonomi Kota Banjar berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

#### **b) Mengidentifikasi Masalah**

Mengidentifikasi masalah adalah suatu hal yang penting, apakah keputusan tersebut bisa berjalan baik dan atau cocok tidaknya keputusan tersebut di terapkan di sebuah sistem, seperti halnya keputusan yang diambil oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota berupa salah satu visinya yaitu menjadikan Kota Banjar menuju Kota agropolitan yang memiliki makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

#### **Masterplan Agropolitan**

*Masterplan* agropolitan atau rencana induk adalah merupakan kerangka dari semua rencana infrastruktur agropolitan di suatu wilayah dalam jangka panjang atau jangka menengah. *Masterplan* agropolitan berfungsi sebagai penataan detail kawasan agropolitan yang didasarkan pada potensi wilayah.

### **Sarana Prasana**

Sarana prasana/infrastruktur penunjang kegiatan agrobisnis juga dibutuhkan dalam mewujudkan visi tersebut, seperti Pasar, untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang gudang tempat penyimpanan dan processing hasil pertanian sebelum dipasarkan. Di Kota Banjar sendiri belum tersedia pasar khusus pertanian yang membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam hal memasarkan produk pertanian.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau peran serta masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan. Partisipasi dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan.

### **Teknologi Agrobisnis**

Syarat selanjutnya menurut Mahi kawasan agropolitan dibutuhkan percobaan/pengkajian teknologi agrobisnis, untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok di kawasan agropolitan. Teknologi agrobisnis adalah pengembangan teknologi berbasis pertanian yang dapat dicirikan melalui inovasi dan introduksi alat atau mesin pertanian untuk proses produksi mulai dari prapanen hingga pasca panen. Contoh perkembangan teknologi agrobisnis adalah rekayasa genetik, pengendalian hama terpadu, kloning, pertanian organik, pemanfaatan hormon, hidroponik dan aeroponik.

### **Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Di Kota Banjar sumber daya lahan untuk mendukung kegiatan pertanian terutama sawah mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai 2019 ada beberapa lahan pertanian yang beralih fungsi mejadi lahan non pertanian sekitar 5 Ha pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang seharusnya menjadi sumber kegiatan pertanian untuk menunjang aktivitas bertani malah dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian hal ini sangat bertentangan dengan prinsip agropolitan yaitu kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agroindustri serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian. Selain komoditas terbesar di Kota Banjar adalah padi. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian masih belum ada.

Dalam pelaksanaan salah satu visi Kota Banjar menuju Kota Agropolitan masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya *maserplan*, kurangnya sarana prasarana yang diberikan pemerintah, rendahnya partisipasi dari masyarakat yang disebabkan sosialisas yang tidak dilakukan dengan konsisten dan merata, tidak adanya teknologi agrobisnis yang menunjang kegiatan agrobisnis, dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

### **c) Tujuan/Sasaran Yang Ingin Dicapai**

Ini diartikan bahwa sesuatu yang ingin direalisasikan dan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi salah satu visi wali Kota Banjar Tahun 2018-2023 menuju Kota Agropolitan yaitu kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian. Dengan cara mengembangkan daya tarik dan potensi daerah sehingga menambahh kenaikan presentase PAD (Pendapat Asli Daerah) sektor pariwisata,

jumlah desa/kelurahan wisata jumlah produk unggulan daerah, jumlah kawasan agropolitan (dalam satu kawasan).

Dalam dokumen RPJMD Kota Banjar tahun 2018-2023 pada BAB V pada lembar 310 terdapat uraian visi Wali Kota Banjar dan keterkaitan antara visi dan misi, pada uraian tersebut terdapat tujuan dan sasaran yang ingin di capai untuk mewujudkan Banjar menuju Kota Agropolitan yang merupakan misi ke-6 yaitu dengan mengembangkan daya tarik dan potensi daerah dengan sasaran persentase kenaikan PAD sektor pariwisata, di Kota Banjar masih belum ada wisata yang berjalan berbasis agro. Pemerintah masih melakukan pembangunan – pembangunan namun pengelolaannya belum ada, sehingga sector pariwisata yang berbasis agro belum mampu membuat kenaikan PAD.

Tujuan Banjar menuju kota agropolitan yaitu dengan sasaran menjadikan aktivitas ekonomi Kota Banjar berbasis agrobisnis agroindustri dan agrowisata di Kota Banjar belum sepenuhnya terlaksana. Pemerintah kurang serius dalam segi pengelolaannya hal tersebut terlihat dari sasaran yang dicapai tidak semua terealisasi, agrobisnis, agroindustri dan agrowisata tidak bisa menjadi tonggak perekonomian Kota Banjar.

### **Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Salah Satu Visi Wali Kota Banjar Menuju Kota Agropolitan**

Dalam implementasi kebijakan, umumnya terdapat kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan salah satu visi Wali Kota Banjar Tahun 2018-2023 yaitu Banjar menuju Kota Agropolitan, baik dalam segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan pendukung lainnya.

hambatan-hambatan yang terjadi pada implementasi salah satu visi wali Kota

Banjar yaitu Banjar menuju Kota Agropolitan diantaranya:

- a. Tidak seriusnya pemerintah dalam mewujudkan visi, hal ini berdasarkan tidak adanya *masterplan* agropolitan, sehingga kawasan yang dikembangkan tidak berdasarkan dari rencana infrastruktur agropolitan dan tidak ada detail kawasannya
- b. Sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai seperti tidak adanya pasar agro yang berjalan sesuai perannya dalam kegiatan agroindustri.
- c. Tidak semua petani di berikan pengetahuan dan pembekalan tentang cara bertani yang baik dan benar, sehingga petani tidak melakukan perawatan pada tanaman seperti memberi pupuk dan mencegah tanaman terserang hama, padahal jika tanamna hanya ditanam dan biarkan maka kualitas tanaman akan menurun seperti rasa manis akan berkurang dan ukuran buah semakin akan semakin kecil sehingga daya jual pun akan menurun. Pemberian pengetahuan tentang strategi pemasaran yang dapat meningkatkan pendapatan juga diperlukan, sehingga dalam pemberian fasilitas berupa bibit gratis dari pemerintah sebagian petani menolak untuk menanam komoditas unggulan yang akan di munculkan di Kota Banjar. Hal tersebut membuat petani enggan mendukung dan tidak ingin berpartisipasi.
- d. Tidak adanya teknologi penunjang agrobisnis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga menyebabkan lambatnya produk untuk bisa dipanen karena masyarakat masih melakukan kegiatan pertanian secara tradisional.

- e. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di sejumlah kawasan pertanian di Kota Banjar. Padi merupakan komoditas terbesar dibidang pertanian dan salah satu pendukung menuju Kota Agropolitan, namun sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian.

Tidak adanya dorongan dari DPRD dan pemerintah yang tidak pernah mendorong untuk mewujudkan visi Banjar menuju Kota Agropolitan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018-2023 yaitu Banjar menuju Kota agropolitan, berdasarkan analisis maka peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018-2023 yaitu Banjar menuju kota agropolitan masih belum terlaksana, serta penjabaran visi yang di tuangkan dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023 cenderung tidak jelas dan tepat sasaran hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjabarkan visi Banjar menuju Kota Agropolitan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018-2023 yaitu Banjar menuju kota agropolitan belum bisa tercapai berdasarkan pelaksanaan keputusan, identifikasi masalah dan tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Mengenai faktor yang menghambat dalam implementasi salah satu visi Wali Kota Banjar tahun 2018-2023 yaitu Banjar menuju Kota Agropolitan, yaitu tidak adanya *masterplan* agropolitan guna menjadi pedoman untuk mewujudkan visi, terbatasnya sarana prasarana penunjang pertanian, rendahnya partisipasi masyarakat, tidak adanya teknologi penunjang pertanian,

dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

### Saran

1. Implementasi salah satu visi wali Kota Banjar tahun 2018-2023 yaitu Banjar menuju Kota Agropolitan perlu dikaji ulang lagi dalam pelaksanaannya, karena visi merupakan cita-cita namun harus sesuai dan jelas dengan sasaran yang akan dicapai guna mensejahterakan masyarakatnya bukan menjadi ajang untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat seperti pro petani karena memang mayoritas masyarakat Kota Banjar adalah petani.
2. Diperlukan keseriusan pemerintah seperti dilakukan komunikasi terkait agropolitan kepada masyarakat secara terus menerus agar meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pertanian dengan konsep agribisnis yang utuh. Di susunnya *masterplan* agropolitan agar visi tersebut menjadi terarah dan tepat sasaran sehingga apa yang diinginkan pemerintah dapat tercapai serta usaha-usahanya dapat mencapai hasil yang diinginkan.
3. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pertanian seperti di sediakannya pasar agro, bantuan bibit dan pupuk gratis, dan sarana penunjang lainnya seperti teknologi yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Serta dalam mewujudkan visi menuju Kota Agropolitan juga diperlukan aturan yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian agar tidak terlalu banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian sehingga visi menuju agropolitan dapat terlaksana tanpa hambatan karena kekurangan lahan pertanian.
4. Dukungan dari DPRD Kota Banjar agar mendorong terwujudnya visi Banjar menuju Kota Agropolitan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sabatier, Paul. 1986. "Top and Bottom Up Approaches to Implementation Research". *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48 Series in Economic Development. Baltimore: John Hopkins. Univ Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo